

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL
SUATU PRODUK DI INDONESIA**

**(Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

TAUFIQ RAHMAN

Nim: 10100113120

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Rahman
NIM : 10100113120
Tempat/Tgl. Lahir : Polewali, 20 Desember 1994
Jurusan : Peradilan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok L10 no 16
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Agustus 2017

Penyusun



TAUFIQ RAHMAN
NIM. 10100113120

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)", yang disusun oleh Taufiq Rahman, NIM: 10100113120, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan.

Makassar, 31 Agustus 2017 M.
9 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. (.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag. (.....)
Munaqasyah I	: Dr. Hj. Patimah, M. Ag. (.....)
Munaqasyah II	: Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc, M.HI. (.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I. (.....)
Pembimbing II	: Dr. Rahma Amir, M. Ag. (.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selesainya penulisan skripsi ini, melibatkan banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Segala bentuk sumbangsih pemikiran dalam menempuh studi ini tak ternilai banyaknya. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain, ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus kepada beberapa pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Beserta segenap stafnya yang telah mencurahkan segenap perhatian dalam membina dan memajukan UIN Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., Wakil Dekan I, II, dan III. Para Dosen serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala bimbingan dan petunjuk serta pelayanan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di UIN Alauddin Makassar.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi Peradilan bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. dan ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag.
4. Pembimbing I, Dr. H. Supardin, M.H.I. dan pembimbing II, Dr. Rahma Amir, M.Ag., yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan.
6. Direktur LPPOM, Khususnya Bapak Drs. H. Jamaluddin Saleh, BcHk. Selaku Wakil Direktur I Kesekretariatan dan seluruh staf pegawai Kantor LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin, melayani dan memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, serta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi menemukan literatur-literatur yang dibutuhkan.
8. Ayahanda Drs. H. M. Ramli, M.Pd. dan Ibunda Andi Ariyani., selaku orang tua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing dan memberikan doa yang tulus. Kakak-kakak, Saktiawan Natas Djasmadi, S.Sos, Anizul Isman, Dewi Sartika, S.S, Rama Yudhi Erlangga, S.T , Adik Nurul Aulia dan Nurul Muhliza, serta segenap keluarga besar atas doa dan motivasi selama melaksanakan studi.
9. Saudara- saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, khususnya Jurusan Peradilan angkatan 2013, Ahmad Fadel, Ahmad Fadil, Akram Ake, Justam, Irfan Baso, Sultan, Hendro, Andi Walinono, Ahmad Fahrul, Nur Azizah Marmillah, Nur Alimahmudrika dan Rini Ramandani yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan.
10. Sahabat KKN Angkatan 53, Nurdin Maskur, Fahri, Wahyudi, Elsa Ervina Tahir.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin (MAPALASTA).

12. Sahabatku yang di Kota Polewali, Ayyub Yasin, Ahmad Muslim, Andi Muh. Chaidir Yusran, S.Ip dan Briptu Amril Nuangsa yang selalu setia memberikan semangat serta doa tulusnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. jualah senantiasa berdoa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan semua pihak, senantiasa bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang setimpal di sisi Allah swt. Amin.

Makassar, 21 Agustus 2017

Penulis,



TAUFIQ RAHMAN
NIM. 10100113120

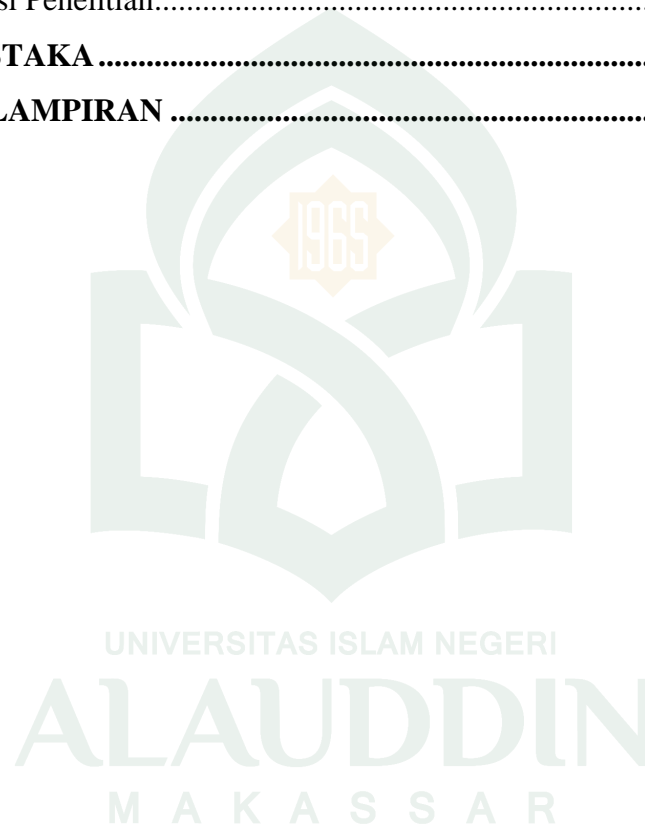


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN TEORETIS	 14-32
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	14
B. Pengertian Labelisasi Halal.....	19
C. Dasar Hukum Labelisasi Halal dan Perlindungan Pangan	25
D. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
E. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia	30
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 33-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40-62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.....	43
C. Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia	56
BAB V PENUTUP	63-64
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65-66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN DAFTAR SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	y	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup

Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

B. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjainah*

C. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

D. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

سَيِّءٌ : *syai'un*

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

F. Lafz al-Jalalah (اللهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *Dinullah billah*

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُّ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fi rahmatillah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

H. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

s.w.t = *subhanallahu wata'ala*

s.a.w = *sallallahu 'alaihi wasallam*

r.a = *radiallahu 'anhu*

H = Hijriah

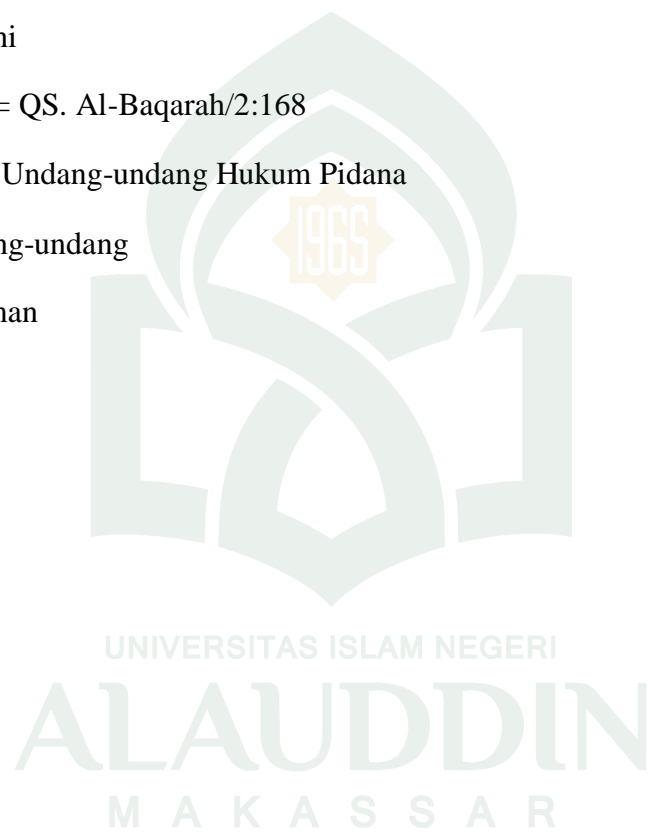
M = Masehi

QS.../...168 = QS. Al-Baqarah/2:168

KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU = Undang-undang

h. = Halaman



ABSTRAK

Nama : Taufiq Rahman
NIM : 10100113120
Jurusan : Peradilan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)

Skripsi ini adalah salah satu kajian yang merumuskan judul ke dalam bentuk pokok masalah yaitu: (1). Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (2). Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci terkait pokok-pokok masalah yang terdapat dalam judul penelitian, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah dianalisis sebagai hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal.

Landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu: Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Sayangnya, pemasaran produk makanan halal belum mampu menguasai pasar global. Negara Republik Indonesia memiliki penduduk muslim yang jumlahnya mencapai 88,20% 207 juta jiwa¹, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang begitu besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara.

¹Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h. 1

Banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya². Hal ini juga dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama agroindustri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan *ingredient* dalam pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan *ingredient* ini didorong oleh kebutuhan akan *ingredient* dengan sifat-sifat tertentu yang diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya *ingredient* pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya³.

Seperti juga yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

² Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h. 2

³ Fika Puspita dkk, *Kehalalan Produk Pangan*, <http://aprienkurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html>. (11Maret 2017)

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁴ . selanjutnya juga dijelaskan masalah kelayakan konsumsi dan ketahanan pangan dalam pasal 1 angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:⁵

- 1) Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 2) Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Mengonsumsi menurut keyakinan agama Islam dan demi kualitas hidup merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, khususnya Undang-undang tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebab mengonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana yang dimaksud oleh firman Allah QS. Surah Al-Baqarah/2: 168.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012*, Bab I, Pasal 1 ayat 1

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012*, Bab I, Pasal 1 ayat 4-5

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁶

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kegiatan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994.

Kegiatan tersebut masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan, juga merasa berhak dalam melakukan sertifikasi halal. Akhirnya, masalah sertifikasi halal ditangani oleh 3 lembaga yaitu MUI, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tersebut pada tahun 1996. Kemudian lahir UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan keamanan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 41

pangan dilakukan melalui jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, dan ketentuan mengenai pencantuman label halal pada kemasan produk dijelaskan dalam Pasal 97 UU tersebut. Lebih lanjut secara detail, labelisasi halal juga diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam PP tersebut, BSN merupakan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang akan dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar inilah BSN membentuk suatu tim Pengembangan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2001 yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Asosiasi Industri Pangan, YLKI dan Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan BSN sendiri.⁷

Melihat berbagai realita produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, produk yang dihasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Terlebih lagi produk-produk yang mereka pasarkan berada dalam daerah yang mayoritas penduduknya agama Islam.

⁷ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan" (No. 2, Vol .5, Tahun 2014 h.3), <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>. (29 Mei 2017).

Pemberian sertifikat halal selain perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat islam, khususnya Indonesia yang penduduknya yang mayoritas beragama islam, juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini mejadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas.

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi umat adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang di bangun oleh perusahaan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh perusahaan itu dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan secara konsisten.

Komponen sistem jaminan halal harus diuraikan secara tertulis, meliputi : kebijakan halal, panduan halal, organisasi manajemen halal, *Standard Operating Procedures* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, sistem organisasi halal/audit internal, tindakan perbaikan dan kaji ulang manajemen.⁸

⁸Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), h. 5.

Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan sesuatu produk, dalam hal ini berkaitan dengan sistem organisasi halal yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah untuk mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangatlah mudah ditemukan, pada produk makanan umumnya. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan pengolahannya dapat saja ditempeli tulisan halal dengan tulisan Arab, maka seolah-olah produk tersebut telah halal dikonsumsi. Padahal penentuan label halal pada suatu produk, tidak bisa hanya asal tempel, harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung hal tersebut.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sertifikasi halal terhadap suatu produk di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan suatu produk di Indonesia, yang dimana dalam kerjanya peran MUI dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian secara empiris terhadap sistem Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, oleh karena itu penulis berinisiatif meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa pembahasan yang menyangkut judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).

Penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia yang menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kerjanya dibantu oleh

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam terhadap produk yang membahayakan dan tidak halal. Namun dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, masyarakat luas perlu mengetahui dan memiliki referensi terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk, agar masyarakat tidak tertipu oleh banyaknya produk yang memiliki label halal yang palsu atau tidak bersertifikasi.

2. Deskripsi Fokus

Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat sistem Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, yang dimana dalam penerapan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi makanan yang halal dan haram menurut syariat agama Islam. Dengan hal ini masyarakat muslim lebih mudah untuk membedakan produk yang tidak seharusnya dikonsumsi, dan lebih mendapatkan perlindungan terhadap banyaknya bahan makanan yang beredar di masyarakat dengan pemakaian boraks, formalin, bahan pengawet dan pewarna pakaian yang dipakai dalam bahan pangan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang menjadi pusat kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)* yang sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melindungi masyarakat dari produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah. Adapun sub masalah yang penulis angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia ?
2. Apa landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia ?

D. *Kajian Pustaka*

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian terdahulu, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan informasi sebelumnya berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Mengenai penelitian terdahulu yang menyangkut sertifikasi halal, penulis menemukan beberapa buku dan skripsi :

1. Buku yang berjudul “Bahaya Makanan Haram”, yang ditulis oleh Thoebib al-Asyhar yang membahas mengenai bahaya makanan haram yang dilihat dari dua segi, yaitu segi substansi dan cara memperolehnya, tetapi juga menjelaskan konsep halal haram makanan dalam Islam.⁹
2. Buku yang berjudul “Menyingkap Produk-Produk Haram” yang ditulis oleh Ahmad H. Sakr, Ph.D. yang membahas tentang keracunan dan fakta-fakta dalam produk-produk makanan, minuman, dan beberapa kesalahan pola pikir sebagian umat Islam sehingga mereka akan dapat lebih arif untuk memilih

⁹ Thoebib al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003)

atau menolak (produk tersebut) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan syariat agama.¹⁰

3. Sugiyono, dengan bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif” terbitan tahun 2012. Buku ini dapat membantu penulis atau peneliti untuk memilih mana permasalahan yang cocok diteliti dengan metode kualitatif dan mana yang cocok dengan metode kuantitatif.¹¹ Buku ini sangat berguna dalam penyusunan skripsi penulis tentunya karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
4. Wahyu Budi Utami, seorang alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. berjudul “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survey Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)”.¹² Penelitian Wahyu ini berbeda dengan penelitian penulis meskipun sama mengenai Labelisasi atau sertifikasi halal akan tetapi penelitian Wahyu ini lebih membahas mengenai keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang telah dilabel halal oleh MUI dalam hal produk kosmetik. Berbeda dengan penelitian penulis, kali ini penulis meneliti bagaimana MUI menerapkan sertifikasi halal terhadap suatu produk.
5. Fatkhurohmah, adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsinya berjudul “Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap

¹⁰ Ahmad Hussein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram* (Jokjakarta: Wahana Cendekia, 2006)

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VII; Bandung, Alfabeta, 2012) h. iii

¹² Wahyu Budi Utami, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survey Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Barokah)”¹³, penelitian Fatkhurohmah ini berbeda dengan penelitian penulis karena dia lebih meneliti terhadap niat membeli konsumen terhadap produk makanan kemasan yang beredar dan ia meneliti terhadap Santri Pondok Pesantren Al-Barokah, sedangkan penulis kali ini lebih meneliti di LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan guna mengetahui proses dan dasar hukum lembaga MUI dalam melakukan sertifikasi halal suatu produk baik itu makanan atau pun produk lain.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu referensi para akademisi dan praktisi guna mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal suatu produk yang beredar di pasaran dan juga agar menjadi referensi bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan proses sertifikasi halal produk yang dihasilkan.

¹³ Fatkhurohmah, “Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Barokah)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk pangan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Tinjauan Yuridis*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.² Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

1. Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Belanda dinamakan "*Recht*" yang berasal dari bahasa Latin "*Rechtum*" yang berarti kebajikan, kebaikan. Selanjutnya kata latin lainnya tentang hukum adalah "*Ius*" yang berarti hukum, berasal dari kata "*lubere*" artinya mengatur, memerintah. Kata "*Ius*" bertalian erat dengan "*Iustaita*" atau keadilan.³

Berikut beberapa definisi tentang hukum dari beberapa aliran ilmu hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

³ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita.

a. Aliran Sosiologis

Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
- 2) Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).
- 3) Hukum bagi Roscoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan Negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.
- 4) Jhering berpendapat bahwa, “ Law is the sum of the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsion” (Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).
- 5) Bellefroid mengartikan hukum, “Stelling recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en ophaar gezag is vastgesteld” (Hukum yang berlaku di suatu masyarakat

mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu).⁴

b. Aliran Realis

Holmes berpendapat, “The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law” (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum).⁵

Llewellyn berpendapat, “What officials do about disputes is the law it self” (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri).

Salmond berpendapat, bahwa hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan.

c. Aliran Antropologi

Schepers berpendapat, “Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts” (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan).

Gluckman berpendapat, “Law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions” (hukum adalah keseluruhan gudang aturan di atas para hakim mendasarkan putusannya).

⁴ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita.

⁵ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita.

Bohannon berpendapat, “Law is that body of binding obligations which has been reinstitutionalised within the legal institution” (hukum adalah merupakan himpunan kewajiban-kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum).⁶

d. Aliran Historis

Karl von Savigny berpendapat, “All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people’s history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people” (Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara).⁷

e. Aliran Hukum Alam

Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.⁸

⁶ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita.

⁷ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita.

⁸ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

Menurut Thomas Aquinas, hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak atau dikekang untuk tidak bertindak.⁹

Jhon Locke berpendapat, bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.¹⁰

Emmanuel Kant berpendapat, bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.¹¹

f. Aliran Positifis

Jhon Austin berpendapat, bahwa hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.¹²

⁹ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

¹⁰ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

¹¹ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

¹² <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

Blackstone berpendapat, bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi untuk ditaati.¹³

Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.¹⁴

B. Pengertian Labelisasi Halal

1. Pengertian Labelisasi

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.¹⁵ Menurut Apriyantono adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk.¹⁶ Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang

¹³ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

¹⁴ <http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/>, di akses pada hari Sabtu 20 Mei 2017. Pukul 16: 16 Wita

¹⁵ Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192.

¹⁶ Apriyantono dan Nubowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 92.

merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.¹⁷

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini biasa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- d. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

2. Pengertian Halal

Pengertian Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang

¹⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhalindo, 2000) Edisi 2, h. 477.

untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁸

Halal dalam bahasa kita berarti diijinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Al quran dan hadits nabi Muhammad saw manusia di larang mengganti atau membolak balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya.¹⁹

Istilah halal dalam Al quran juga sering digunakan dalam konteks yang lain. Sebagian diantaranya merujuk pada makanan, seperti yang terdapat dalam Al qur'an, QS Al-Maidah/ 5:87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.²⁰

¹⁸Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

¹⁹ Ahmad Hussein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram* (Jokjakarta: Wahana Cendekia, 2006),h. 37-38

²⁰ Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 122

a. Pentingnya Makanan Halal Bagi Muslim

Islam datang ketika umat manusia memandang makanan dan minuman dari dua sudut pandang *ekstrem*. *Pertama*, sebagian manusia menempatkannya hidup yang diperlukan untuk kepentingan nafsu *hayawaniyah* (kebinatangan) dengan mengonsumsinya secara berlebihan. *Kedua*, Justru ditempatkan sebaliknya, yaitu ditinggalkan sama sekali dengan melakukan puasa sehari-semalam penuh (Jawa: *ngebleng*) dengan maksud-maksud tertentu.

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat islam mengajarkan kepada umat manusia pada umumnya dengan menempatkan makanan dan minum pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dengan tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus pula tetap dalam kerangka semangat spiritualisme.²¹

Allah menegaskan dalam firman-Nya: QS. Al Baqarah /2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai kalian umat manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.²²

²¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 79.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 25

Menurut Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah bahwa makna ayat tersebut adalah seorang mukmin (orang yang beriman) sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh syariat saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga *tayyibah* (baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan baik itulah barang konsumsinya orang-orang yang beriman.²³ Sedangkan menurut Ibnu Katsir makna ayat tersebut adalah Allah swt telah membolehkan (menghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya.²⁴

Makanan halal yang disebut ayat tersebut menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spiritualisme dalam halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan sunnah-Nya. Makanan yang kita makan harus jelas asal usul dan jenisnya.²⁵

b. Dampak Makanan Halal Terhadap Perilaku

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kehalalan pangan yang kita konsumsi sudah pasti mengandung berbagai maksud dan manfaat. Di samping karena alasan yang bersifat lahir (yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh), juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. Demikian juga

²³ Muhammad Fachmi Hidayat, *Ngaji Tafsir Al-Qur'an*, <http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.co.id.html>. Diakses tanggal 30 Agustus 2017.

²⁴ Muhammad Fachmi Hidayat, *Ngaji Tafsir Al-Qur'an*, <http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.co.id.html>. Diakses tanggal 30 Agustus 2017.

²⁵ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 80.

Allah memberikan ruang-ruang kepatuhan sebagai hamba untuk dijadikan tolak ukur keimanan dan ketakwaan, sejauh mana manusia yang mengaku dirinya beriman mau dan mampu menjalankan Syari'at-Nya.

Diantara dampak yang bisa dirasakan secara langsung dari makanan halal terhadap perilaku adalah sebagai berikut:

Pertama, menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci (*fitrah*) sebagaimana baru dilahirkan di dunia. Dengan mengkonsumsi makanan halal, berarti kita konsisten dengan garis kesepakatan yang pernah terjadi di dalam kandungan ibu kita (alam *arwah*) yang berisi persetujuan bahwa Allah adalah Tuhan kita yang mengatur segala urusan seiring dengan amal shaleh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan *fitrah* manusia seiring maksud.ayat: QS.Al-Mukminun/23:51.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shaleh.²⁶

Ayat tersebut sangat menganjurkan manusia untuk selalu mencermati dengan sungguh-sungguh terhadap konsumsinya sebelum ia melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai *fitrah*.

Kedua, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 345

Ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatnya kualitas kesalehan baik lahir maupun batin.

Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri di hadapan Allah. Orang yang selalu mengonsumsi makan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.²⁷

3. Pengertian Labelisasi halal

Labelisasi halal ialah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi.²⁸

C. *Dasar Hukum Labelisasi Halal dan Perlindungan Pangan.*

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label.²⁹

²⁷ Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 86.

²⁸ Labelisasi Halal, Pengertian dan Tinjauan, <http://www.Referensi.makalah.Com/> 2013 /02/labelisasi-halal-pengertian-dan-tinjauan.html, pada tanggal, 6 mei 2017, pukul 16.36.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 8 ayat (1) huruf h

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.³¹

Undang-Undang Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³² Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib.³³

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
3. Memiliki Penyelia Halal, dan
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kemudian, setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib.³⁴

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 1 angka 1.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 1 angka 2.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 4.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 24.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 25.

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa :³⁵
 - 1) Peringatan tertulis.
 - 2) Denda administratif, atau
 - 3) Pencabutan sertifikat halal.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.³⁶

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:³⁷

- a) kemasan Produk;
- b) bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c) tempat tertentu pada Produk.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 27 ayat (1)

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 37

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 38

Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.³⁸

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.³⁹

D. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁴⁰

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 39

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Produk Halal*, Pasal 56

⁴⁰ Lihat penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴¹

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:⁴²

- a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- a. asas kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

⁴² Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 33.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴³

E. *Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia*

1. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah atau tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI,"

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.⁴⁴

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah swt.
- b. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

⁴⁴ <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, di akses pada hari Sabtu 05 Agustus 2017. Pukul 10:38 Wita

2. VISI dan MISI

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

b. Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengawal umat Islam dalam melaksanakan Aqidah Islamiyah, membimbing mereka dalam menjalankan ibadah, menuntun mereka dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan mereka dalam mengembangkan akhlakul karimah.⁴⁵



⁴⁵ Anwar Abbas, dkk, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun tindakannya, dan secara dekskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dalam mengungkapkan Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian LP POM MUI Sulawesi Selatan, Kampus I Universitas Islam Negeri Alauddin Jl. Sultan Alauddin No 63 Telp. 0411-2421918; Fax 0411-863909 Makassar 90221.

¹ Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), h. 6.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis baik normatif maupun empiris yaitu pendekatan yang penulis harus meneliti data sekunder terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan meneliti data primer yang terdapat di lapangan.²

C. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan pariset untuk mengumpulkan data.³ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah suatu kegiatan mencari dan mengolah data-data literature yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literature yang dimaksud adalah berupa buku, ensiklopedia, karya ilmiah, dan sumber data lainnya yang didapatkan diberbagai perpustakaan.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴ Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis. Observasi ini penulis akan gunakan untuk mendapatkan data tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).

b. Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula.⁵

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung

⁴ Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

⁵ Nana Syaodih Sukma dinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222.

bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.⁶

Wawancara direncanakan dilakukan pada jam-jam kantor.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data dengan benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks dan gambar serta beberapa yang terkait untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan historikalnya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara pada informan dari Pejabat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

⁶ Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 73.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM press, 1999), h. 72.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, majalah, koran, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai referensi

E. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.⁸ Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat.

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (*field research*) meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

⁸ Suharsimi Arikunto, *prosedur peneliti suatu pendekatan praktik* (edisi revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.⁹ Peneliti akan melakukan pencatatan dan mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁰ Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹¹ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei dan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya,

⁹ Pawito, *Penelitian komunikasi kualitatif* (Cet I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008), h. 89.

¹⁰ Noen Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 183.

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2007), h. 103.

penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.¹²

Analisis data yang dilakukan adalah mencoba mereduksi data penelitian yang telah dikumpulkan dari informan, kemudian mengelompokkan atau mengkategorikan data tersebut sehingga mudah diberikan kesimpulan dan dalam penyajian datanya.



¹² Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI press, 1992), h. 15.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tentang LPPOM

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah atau negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Sedangkan kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencamtuman label halal dalam kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke 28 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 23 negara.¹

2. VISI dan MISI LPPOM MUI

a. VISI

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi, dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

b. MISI

- 1) Menetapkan dan mengembangkan standar halal dan standar audit halal.
- 2) Melakukan sertifikasi produk pangan, obat, dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.

¹ <http://www.halalmui.org>, di akses pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2017. Pukul 15:25 Wita

- 3) Melakukan edukasi halal dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- 4) Menyediakan informasi tentang kehalalan produk dari berbagai aspek secara menyeluruh.

3. LOKASI KANTOR LPPOM MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Kampus I Universitas Islam Negeri Alauddin, Jalan Sultan Alauddin No.63 Makassar 90221. Telepon : 0411-863909. Fax : 0411-863909.
Email : lppommuisulses06@yahoo.com.

4. STRUKTUR PENGURUS LPPOM MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- a. Tajuddin Abdullah,ST,Mkes. (Direktur).
- b. Drs.H.Jamaluddin Saleh,BcHk. (Wakil Direktur I Kesekretariatan).
- c. Nurmayani,S.Si,Apt. (Wakil Direktur II Auditing).
- d. Drh.Wahyu Suhadji (Wakil Direktur III Sosialisasi).
- e. Andi Mutiah Anwar,ST (Kabid. Administrasi).
- f. Ir.Suparwo (Kabid. Keuangan).
- g. Ernawati,S.Si (Kabid. Auditing).
- h. Arniati Samalia,S.Si,M.Kes (Kabid. Sistem Jaminan Halal).
- i. Raudhatul Jannah Syarief,STP (Kabid. Sosialisasi dan Pembinaan AHI).
- j. M.Rusdi,S.Si,M.Si,Apt (Kabid. Promosi Produk Halal).

B. Proses Sertifikasi Halal Produk Yang Dilaksanakan Oleh Majelis Ulama Indonesia

Bagi produsen yang ingin memperoleh sertifikasi halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran atau katering atau dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati produsen yang akan mendaftar proses sertifikasi halal :

1. PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL.

- a. Pengambilan formulir sertifikasi halal di sekretariat LPPOM MUI.
- b. Bimbingan singkat tentang tatacara pengisian formulir dan tatacara penyusunan manual sistem jaminan halal (SJH). Produsen terlebih dahulu diisyaratkan mempersiapkan sistem jaminan halal seperti diuraikan dibawah ini :
 - 1) Sistem jaminan halal harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan.
 - 2) Dalam sistem pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal yang memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen, serta berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
 - 3) Produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya tetap terjamin.

- 4) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba pada lingkungan produsen. Sehingga seluruh jajaran manajemen dari tingkat direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana cara memproduksi produk yang halal dan baik.
 - 5) Sistem jaminan halal dalam pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh sistem audit halal internal yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - 6) Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilaksanakan oleh Tim Auditor Halal Internal yang mewakili seluruh bagian terkait dengan produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan. Koordinator Audit Halal Internal harus beragama Islam.
 - 7) Penjelasan rinci sistem jaminan halal dapat merujuk pada Buku Panduan Sistem Jaminan Halal, yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- c. Melengkapi formulir dan membuat manual sistem jaminan halal.
- d. Mengembalikan formulir yang telah diisi lengkap ke Sekertariat LPPOM MUI, dengan melampirkan :
- 1) Dokumen bukti kehalalan (sertifikat halal) bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.
 - 2) Dokumen manual sistem jaminan halal yang telah dibuat (2 rangkap).

e. Membayar biaya pendaftaran.²

- 1) Produsen mendaftarkan produk yang akan disertifikasi, dengan mengembalikan formulir pendaftaran yang lengkap dengan lampirannya dan membayar biaya pendaftaran sebesar **Rp. 150.000,-**
- 2) Produsen membayar 100% dari biaya sertifikasi sebelum melakukan kunjungan audit.
- 3) Biaya yang dibayarkan bukan merupakan jaminan diterbitkannya sertifikasi halal.
- 4) Matriks biaya sertifikasi halal LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

a) Biaya Rumah Potong Hewan (RPH)

- a. Maksimal Rp. 5.000.000,- bagi RPH Besar.
 - 1) Jenis hewan yang dipotong berupa sapi dan sejenisnya. Mempunyai badan hukum dan jumlah hewan yang dipotong di atas 5 ekor per hari.
 - 2) Jenis hewan yang dipotong berupa ayam dan sejenisnya dengan menggunakan alat *conveyor* dengan kapasitas produksi di atas 1.500 ekor per hari.
 - 3) Jenis hewan dipotong berupa domba dengan kapasitas produksi di atas 35 ekor per hari.
- b. Maksimal Rp. 3.500.000,- RPH Menengah.
 - 1) Jenis hewan yang dipotong berupa sapi dan sejenisnya dengan jumlah hewan yang dipotong antara 3-5 ekor per hari.

² Drs. H. Jamaluddin Saleh, BcHk, Wakil Direktur I Kesekretariatan, wawancara, Kantor LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 02 Agustus 2017.

- 2) Jenis hewan yang dipotong berupa ayam dan sejenisnya dengan menggunakan alat *conveyor* atau tidak menggunakan alat *conveyor* dengan kapasitas produksi antara 900 sampai 1.500 ekor per hari.
- 3) Jenis hewan yang dipotong berupa domba dengan kapasitas produksi di atas 35 ekor per hari.

c. Maksimal Rp. 2.600.000,- RPH Kecil.

- 1) Jenis hewan yang dipotong berupa sapi dan sejenisnya dengan jumlah hewan yang dipotong dibawah 3 ekor per hari.
- 2) Jenis hewan yang dipotong berupa ayam dan sejenisnya dengan kapasitas produksi dibawah 900 ekor per hari.
- 3) Jenis hewan yang dipotong berupa domba dengan kapasitas produksi dibawah 21 ekor per hari.

Catatan : *Biaya tersebut, tidak termasuk transportasi, konsumsi, dan penginapam Auditor pada waktu melakukan audit.*

b) Biaya Sertifikasi Halal Catering.

- a. Produsen mendaftarkan produk yang akan disertifikasi, dan mengambil formulir dengan biaya sebesar Rp. 150.000,-
- b. Produsen membayar 100% dari biaya sertifikasi halal sebelum dilakukan audit.
- c. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah menu, sesuai matriks biaya sertifikasi halal sebagai berikut.

Catering: (tiap 1 outlet)

No.	Jumlah Menu	Biaya	Keterangan
1	1 s/d 50	Rp. 5.700.000	2 orang Auditor
2	51 dan seterusnya	Dikenakan biaya Rp.20.000 per menu	

- d. Biaya yang dibayarkan bukan merupakan jaminan diterbitkannya sertifikasi halal.
- e. Dan jika dilapangan ditemukan menu baru selain menu yang didaftarkan maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per menu.
- f. Melaksanakan audit dilokasi produksi sesuai hari dan tanggal yang disepakati antara tim auditor yang ditugaskan dengan pimpinan perusahaan.

Catatan: Biaya tersebut, tidak termasuk transportasi, konsumsi, dan penginapan Auditor pada waktu melakukan audit.

c) Biaya Sertifikasi Halal Produk Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika.

- a. Produsen mendaftarkan produk yang akan disertifikasi, dan mengambil formulir dengan biaya sebesar Rp. 150.000,-
- b. Produsen membayar 100% dari biaya sertifikasi sebelum dilakukan kunjungan audit.
- c. Biaya yang dibayarkan bukan merupakan jaminan diterbitkannya sertifikasi halal.

Zona 1. (Wilayah Makassar)

Matriks biaya berdasarkan pengelompokkan (Rp. 000,-)

B	A 1		A 2		A 3	
	B 1	B 2	B 1	B 2	B 1	B2
C 1	5.200	4.700	4.200	3.700	3.200	2.700
C 2	4.950	4.450	3.950	3.450	2.950	2.450

Keterangan Kriteria Pengelompokkan Usaha :

1. Skala usaha : (omzet Rp/\$)
 - a. A.1. Usaha Besar
 - b. A.2. Usaha Menengah
 - c. A.3. Usaha Kecil atau IRT
2. *JUDGEMENT* : (Kerumitan pemeriksaan dan *Expert*)
 - a. B.1. Tinggi
 - b. B.2. Rendah
3. Teknologi :
 - a. C.1. Teknologi Modern
 - b. C.2. Teknologi Konvensional

CATATAN : Biaya-biaya diatas belum termasuk :

- 1. Transportasi PP, Konsumsi pada saat mengaudit dan penginapan auditor diluar kota (sesuai hotel standar).**
- 2. Industri pengolahan yang menggunakan bahan baku daging dikenakan biaya Tes Kit sebesar Rp. 200.000,- per item**
- 3. Biaya Uji Laboratorium lanjutan dibebankan sesuai tarif laboratorium yang direkomendasikan oleh LPPOM MUI.**
- d. Melaksanakan audit dilokasi produksi sesuai hari dan tanggal yang disepakati antara tim auditor yang ditugaskan dengan pimpinan perusahaan.**

Zona 2. (Wilayah Gowa, Takalar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Bantaeng, Bone, Sinjai, Wajo, Soppeng, dan Bulukumba)

Matriks biaya berdasarkan pengelompokan (Rp. 000,-)

B	A 1		A 2		A 3	
	B 1	B 2	B 1	B 2	B 1	B2
C 1	5.400	4.900	4.400	3.900	3.400	2.900
C 2	5.150	4.650	4.150	3.650	3.150	2.650

Keterangan Kriteria Pengelompokan Usaha :

1. Skala Usaha : (omzet Rp/\$)
 - a. A.1. Usaha Besar
 - b. A.2. Usaha Menengah
 - c. A.3. Usaha Kecil / IRT
2. *JUDGEMENT* : (Kerumitan pemeriksaan dan *Expert*)
 - a. B.1. Tinggi
 - b. B.2. Rendah
3. Teknologi :
 - a. C.1. Teknologi Modern
 - b. C.2. Teknologi Konvensional

CATATAN : Biaya-biaya diatas belum termasuk :

- 1. Transportasi PP, Konsumsi pada saat mengaudit dan penginapan auditor diluar kota (sesuai hotel standar).**
- 2. Industri pengolahan yang menggunakan bahan baku daging dikenakan biaya Tes Kit sebesar Rp. 200.000,- per item**
- 3. Biaya Uji Laboratorium lanjutan dibebankan sesuai tarif laboratorium yang direkomendasikan oleh LPPOM MUI.**

Zona 3. (Wilayah Enrekang, Tator, Tator Utara, Luwu, Palopo, Luwu

Utara, Luwu Timur, dan Selayar)

Matriks biaya berdasarkan pengelompokan (Rp. 000,-)

B	A 1		A 2		A 3	
	B 1	B 2	B 1	B 2	B 1	B2
C 1	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
C 2	5.250	4.750	4.250	3.750	3.250	2.750

Keterangan Kriteria Pengelompokan Usaha :

1. Skala Usaha : (omzet Rp/\$)
 - a. A.1. Usaha Besar
 - b. A.2. Usaha Menengah
 - c. A.3. Usaha Kecil / IRT
2. *JUDGEMENT* : (Kerumitan pemeriksaan dan *Expert*)
 - a. B.1. Tinggi
 - b. B.2. Rendah
3. Teknologi :
 - a. C.1. Teknologi Modern
 - b. C.2. Teknologi Konvensional

CATATAN : Biaya-biaya diatas belum termasuk :

- 1. Transportasi PP, Konsumsi pada saat mengaudit dan penginapan auditor diluar kota (sesuai hotel standar).**
- 2. Industri pengolahan yang menggunakan bahan baku daging dikenakan biaya Tes Kit sebesar Rp. 200.000,- per item**
- 3. Biaya Uji Laboratorium lanjutan dibebankan sesuai tarif laboratorium yang direkomendasikan oleh LPPOM MUI.**

2. PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI HALAL

Adapun tata cara pelaksanaan audit sertifikasi halal di LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Direktur LPPOM MUI menugaskan tim auditor dengan surat penugasan untuk melaksanakan audit dilokasi produksi.
- b. Tim auditor yang ditugaskan, mempelajari berkas pendaftaran dan menghubungi pimpinan perusahaan untuk menyepakati waktu pelaksanaan audit sertifikasi halal.
- c. Perusahaan membayar sertifikasi halal kepada LPPOM MUI, sesuai matriks biaya yang berkenaan dengan golongan perusahaan.
- d. Perusahaan menjemput tim auditor di Sekertariat LPPOM MUI untuk melaksanakan audit pada hari yang disepakati.
- e. Tim auditor yang telah melaksanakan audit, membuat laporan hasil audit untuk selanjutnya dibahas pada rapat auditor LPPOM MUI

3. RAPAT AUDITOR HALAL LPPOM MUI.

- a. Tim auditor yang telah melaksanakan audit mempresentasikan laporan hasil audit.
- b. Staf Sekertariat LPPOM MUI membuat berita acara rapat auditor untuk diajukan pada rapat komisi fatwa MUI.

4. RAPAT KOMISI FATWA MUI.

- a. Direktur LPPOM MUI dan atau ketua tim auditor masing-masing mempresentasikan berita acara rapat auditor pada rapat komisi fatwa.
- b. Anggota (peserta rapat) komisi fatwa menanggapi presentase Direktur dan atau auditor.
- c. Ketua komisi fatwa (pimpinan rapat komisi fatwa) menanyakan kepada peserta rapat apakah produk perusahaan yang diajukan bisa difatwakan sebagai produk halal ?. Bila seluruh peserta rapat sepakat, maka ketua komisi fatwa menetapkan fatwa halal atas produk perusahaan yang diajukan. Bilamana peserta rapat belum sepakat, maka ketua komisi fatwa memerintahkan kepada Direktur LPPOM MUI untuk melakukan kaji ulang atau audit ulang terhadap produk yang masih bermasalah.

5. PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL.

- a. Berdasarkan fatwa halal yang ditetapkan pada rapat komisi fatwa MUI, Sekertariat LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal semua produk yang telah di fatwakan.

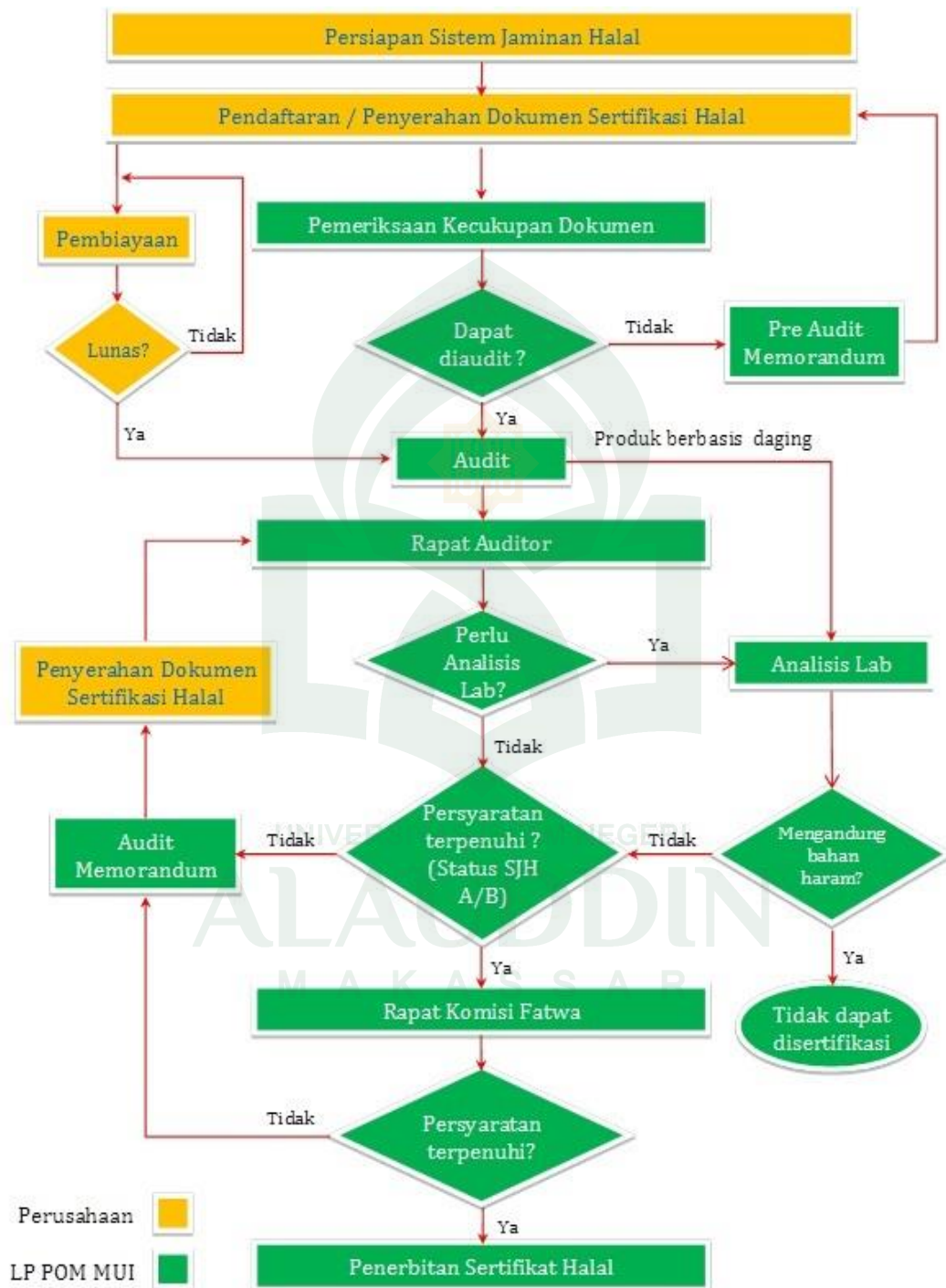
- b. Staf Sekretariat LPPOM MUI mengundang pimpinan perusahaan atau perwakilannya untuk menerima sertifikasi halal.

Drs.H.Jamaluddin Saleh, BcHk. Wakil Direktur I Kesekretariatan LPPOM MUI mengatakan, “Untuk masa berlakunya sertifikasi halal adalah 2 Tahun dan prosedur perpanjangan sertifikasi halal sama dengan proses sertifikasi halal yang baru. Kemudian, Pemberian sertifikat halal selain perlindungan konsumen, keuntungan yang diperoleh suatu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal adalah konsumen yakin atas produk yang mereka akan konsumsi, namun masih banyak industri yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan yang belum melakukan proses sertifikasi halal. Dan untuk mengenali produk yang telah melakukan proses sertifikasi halal dengan cara melihat label halal yang berlogo MUI dan mempunyai nomor registrasi”³.



³ Drs. H.Jamaluddin Saleh, BcHk, Wakil Direktur I Kesekretariatan, *wawancara*, Kantor LPPOM MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 02 Agustus 2017.

**DIAGRAM ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL PADA LPPOM
MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN**



C. Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia.

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur proses sertifikasi halal antara lain Kepmenkes RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes RI No.82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut

Pasal 1, “Mengubah dan menambah ketentuan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 17 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8, “Produsen dan Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10, “(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh Fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11, “Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 12, “(1) Berdasarkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan :

- a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”
- b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 17, “Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya Keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Berdasarkan ketentuan diatas maka izin pencamtuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan/ Badan POM)

berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan sertifikasi halal secara operasional di tangani oleh LPPOM MUI.

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi halal antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34, “(1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut”.

Pada penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 34 ayat 1 disebutkan, “Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya”.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1, “(5) Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui rekayasa genetika dan iridiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Pasal 10, “(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11, “(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Selanjutnya, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut :

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

3. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
4. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
5. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kiamiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
7. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk.
9. Sistem Manajemen Halal Indonesia yang selanjutnya disingkat SMHI adalah seperangkat unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin proses produk halal.
10. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,

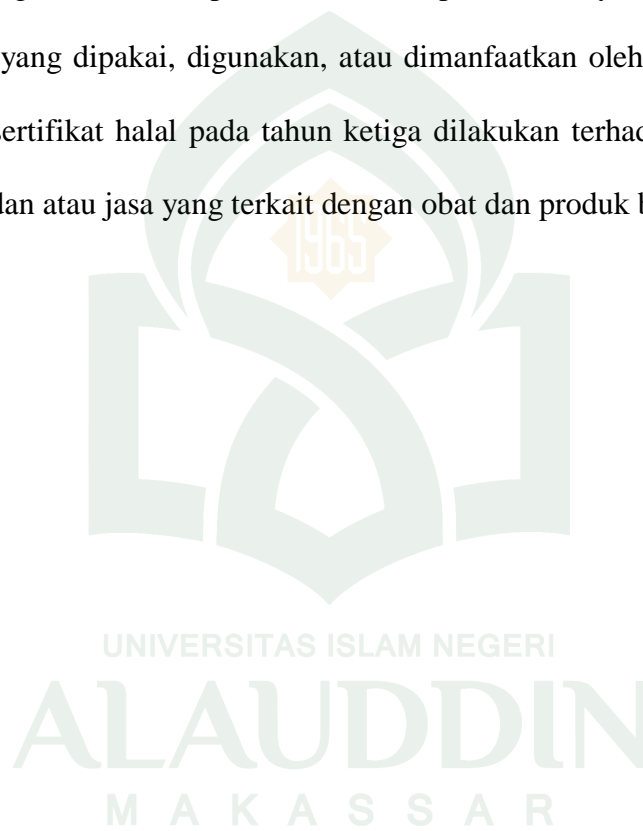
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

11. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
12. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk
13. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
14. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di dalam Pasal 2, “(1) Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (2) Jenis produk yang dimaksud pada ayat (1) berupa barang dan atau jasa. (3) Barang dan atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 3, “(1) Jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib bersertifikat halal secara bertahap sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan. (2) Kewajiban

bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap terhitung mulai 1 November 2016. **(3)** Kewajiban bersertifikat halal pada tahun kesatu dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan dan minuman. **(4)** Kewajiban bersertifikat halal pada tahun kedua dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. **(5)** Kewajiban bersertifikat halal pada tahun ketiga dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan atau jasa yang terkait dengan obat dan produk biologi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Proses Sertifikasi Halal Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Adapun proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu:

- a. Pendaftaran.
- b. Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal
- c. Rapat Auditor Halal LPPOM MUI
- d. Rapat Komisi Fatwa MUI
- e. Penerbitan Sertifikat Halal

2. Landasan Hukum Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.

Adapun landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- b. Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sertifikasi Halal suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). Bagi penulis penelitian seperti ini sangat membantu para akademisi dan praktisi guna mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal suatu produk yang beredar di pasaran dan juga agar menjadi referensi bagi pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal pada suatu produk yang dihasilkan. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk pangan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahnya

- Agustin, Husnul. *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Angipora dan Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.\
- Apriyantono dan Nubowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur peneliti suatu pendekatan praktik*, edisi revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dinata, Nana Syaodih Sukma. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Fatkhurohmah, "Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal, Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Barokah", *Skripsi* , Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM press, 1999.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin, Edisi Pertama, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2009.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhal lindo, 2000.
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007.
- Muhajirin, Noen . *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Pawito, *Penelitian komunikasi kualitatif*, Cet I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008.

- Poernomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Puspita Fika dkk, *Kehalalan Produk Pangan*, [http:// aprien kurniawan 04.blogspot. co. id/2013/04/makalah-pangan-halal.html](http://aprien.kurniawan04.blogspot.co.id/2013/04/makalah-pangan-halal.html). (11Maret 2017). Pukul 09:00.
- Sakr, Ahmad Hussein. *Menyingkap Produk-Produk Haram*, Jokjakarta: Wahana Cendekia, 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
-----, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*
-----, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI press, 1992.
- Sayekti, Nidya Waras. *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*, No. 2, Vol .5, Tahun 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VII; Bandung, Alfabeta, 2012.
- Utami, Wahyu Budi. “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Survey Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses MUI (LPPOM MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Berapa biaya untuk memperoleh sertifikat halal?
3. Sampai kapan berlakunya sertifikat halal?
4. Bagaimana prosedur perpanjangan sertifikat halal?
5. Melihat berbagai realita produk olahan yang haram dan berbahaya, apakah semua industri makanan dan minuman yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan sertifikasi halal?
6. Pemberian sertifikasi halal selain perlindungan konsumen, apa saja keuntungan yang diperoleh ketika suatu produk mendapatkan sertifikasi halal?
7. Di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, penggunaan label halal suatu produk yang beredar sangat mudah ditemukan. Bagaimana tanggapan MUI melihat hal tersebut?
8. Apa yang menjadi landasan hukum MUI dalam penerapan sertifikasi halal?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Papan Nama Kantor LPPOM Prov. Sul-Sel di Jln. Slt. Alauddin. No. 63



Kantor LPPOM Prov. Sul-Sel di Jln. Slt. Alauddin. No. 63



Ruangan Kantor LPPOM Prov. Sul-Sel di Jln. Slt. Alauddin. No. 63



Wawancara dengan Bpk. Drs. Jamaluddin Saleh, BcHk. Wakil Direktur I Kesekretariatan LPPOM Prov. Sul-Sel

ALAUDDIN
MAKASSAR



120171914210036

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9871/S.01P/P2T/07/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : Sl.1/PP.00.9/2253/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TAUFIQ RAHMAN**
Nomor Pokok : 10100113120
Program Studi : Peradilan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SUATU PRODUK DI INDONESIA (STUDI PADA LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juli s/d 09 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 07-07-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2ibkpmduiselselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Sekretariat: Kampus 1 UIN, Jl. Sultan Alauddin No. 63, MAKASSAR 90221 Telp/ Fax. 0411 863909
Email : lpommuisulsel06@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENELITIAN

No.145/LPPOM MUI-SS/SH/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur LPPOM MUI Propinsi Sulawesi Selatan,
menerangkan bahwa :

Nama : Taufiq Rahman
Universitas : Universitas Islam Negeri Makassar
Judul Penelitian : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL
SUATU PRODUK DI INDONESIA (STUDI PADA LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA
INDONESIA PROVINSI SULAWESI-SELATAN)"**.

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di LPPOM MUI Propinsi Sulawesi
Selatan pada tanggal 10 Juli s/d 09 Agustus 2017.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima
kasih.

Makassar, 23 Agustus 2017

Direktur LP.POM MUI
Propinsi Sulawesi Selatan,



Tajuddin Abdullah, ST.M.Kes

RIWAYAT HIDUP



Taufiq Rahman, lahir di Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Desember 1994. Penulis adalah anak ke lima dari tujuh bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Drs. H. M. Ramli, M.Pd dan Andi Ariyani, saat ini penulis dan keluarga berdomisili di Kota Makassar. Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2000 di SDN 066 Pekkabata tepatnya di Kota Polewali dan menimba ilmu selama enam tahun dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Polewali dan lulus pada tahun 2009. Setelah selesai, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Polewali dan akhirnya selesai pada tahun 2012.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di SMAN 3 Polewali pada tahun 2012, penulis memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis mengambil program strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Tidak Selesai). Tahun 2013, penulis kembali mendaftar dikampus yang sama yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan dan selesai pada tahun 2017, dengan judul karya tulis ilmiah (skripsi) **“Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sertifikasi Halal suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di berbagai jenjang sebagai bekal bagi kehidupan dunia dan akhirat dan semoga mendapat rahmat dari Allah swt di kemudian hari. Serta dapat membahagiakan orang tua dan keluarga.